



## **EFEKTIFITAS PAKET STIMULUS DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL**

Venti Eka Satya\*

### Abstrak

*Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan perekonomian selama libur sekolah pada bulan Juni sampai Juli 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pemantik pertumbuhan dan perputaran ekonomi. Artikel ini bertujuan membahas mengenai lima paket stimulus ekonomi pemerintah dan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan stimulus berupa lima paket kebijakan yang terdiri dari: diskon transportasi, diskon tarif tol; penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan; serta bantuan subsidi upah. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas paket stimulus ini serta menilai kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan hanya akan membebani anggaran. Komisi XI DPR RI perlu memantau pelaksanaan program stimulus ini agar dapat tepat sasaran dan bebas dari kebocoran birokrasi. Selain itu juga perlu mendorong pemerintah untuk mendesain program yang dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar dan berdampak jangka panjang.*

### **Pendahuluan**

Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi Triwulan II (Q2) 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah, yang berlangsung pada bulan Juni sampai Juli 2025, melalui pemberian stimulus ekonomi. Lima paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. Hal ini merupakan upaya antisipasi terhadap peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah (P.D, 2025).

Stimulus Ekonomi Q2 tahun 2025, yang akan diberlakukan pada tanggal 5 Juni 2025 ini telah dibahas pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri tanggal 23 Mei 2025. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan/perwakilan kementerian/lembaga terkait ("Rincian 6 paket insentif", 2025).

\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: venti.satya@dpr.go.id

Para ekonom menilai kebijakan tersebut sangat dibutuhkan dalam jangka pendek untuk menjaga momentum pertumbuhan dalam mengatasi dampak efisiensi anggaran yang sudah mulai terasa. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pemantik pertumbuhan dan perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, strategi jangka panjang tetap dibutuhkan agar dampak kebijakan dapat berkelanjutan. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang dapat mendorong investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan pertumbuhan finansial yang sehat ("Ekonom Nilai Enam", 2025; Ekaptiningrum, 2025). Artikel ini bertujuan membahas mengenai lima paket stimulus ekonomi pemerintah dan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Lima Paket Stimulus Ekonomi**

Rakortas tingkat Menteri memutuskan bahwa pemerintah akan mengeluarkan kebijakan stimulus berupa enam paket kebijakan yang terdiri dari: diskon transportasi, diskon tarif tol; diskon tarif listrik; penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan; bantuan subsidi upah (BSU); dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Pada tanggal 2 Juni 2025 Menteri Keuangan mengumumkan paket program stimulus ini dan berubah menjadi Lima Paket Stimulus Ekonomi. Diskon tarif listrik tidak lagi menjadi bagian dari program stimulus. Anggaran untuk paket ini bernilai Rp24,44 triliun yang bersumber dari APBN senilai Rp23,59 triliun dan non-APBN senilai Rp0,85 triliun ("Pemerintah Luncurkan Lima", 2025).

Rincian kelima paket stimulus ini yaitu (Safitri, 2025): *pertama*, program diskon moda transportasi pada masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025. Diskon 30% tiket kereta api disediakan bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran Rp0,3 triliun. Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi akan kembali dikenakan skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% dengan anggaran Rp0,43 triliun, menysar sekitar 6 juta penumpang. Angkutan laut juga mendapatkan potongan harga sebesar 50% untuk 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun. Total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,

*Kedua*, tarif jalan tol akan diberikan diskon 20% selama periode yang sama untuk 110 juta pengguna. Program ini merupakan operasi non-APBN yang diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menetapkan kebijakan diskon tarif tol.

*Ketiga*, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial. Tambahan dana sebesar Rp200.000 per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 kilogram beras gratis per bulan, dengan total 20 kilogram selama dua bulan.

Paket stimulus keempat adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565.000 guru honorer dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Total anggaran BSU ini mencapai Rp10,72 triliun.

*Kelima*, pemerintah memperpanjang diskon 50% iuran JKK bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya yaitu: industri makanan, minuman, tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furniture. Targetnya adalah para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan.

Selain itu, paket stimulus ini juga dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni ini sebesar Rp49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya program stimulus dan berbagai langkah percepatan pertumbuhan ekonomi lainnya seperti: makan bergizi gratis (MBG), perumahan, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, dan rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah, diharapkan pada Q2 2025 pertumbuhan ekonomi dapat mendekati 5%.

### **Efektivitas Paket Stimulus Ekonomi**

Pemerintah mengeluarkan paket stimulus untuk merespons dampak perekonomian global dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dosen Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menyatakan bahwa stimulus ini sangat dibutuhkan dalam jangka pendek untuk menjaga momentum pertumbuhan dalam mengatasi dampak efisiensi anggaran yang sudah mulai terasa. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pemantik pertumbuhan dan perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik. Meski demikian, strategi jangka panjang tetap dibutuhkan agar dampak kebijakan ini dapat berkelanjutan. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang dapat mendorong investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan pertumbuhan finansial yang sehat (Ekaptiningrum, 2025).

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai lima insentif ekonomi ini merupakan langkah tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, untuk mencapai angka pertumbuhan 5%, stimulus ini kurang memadai ("Ekonom Nilai Enam", 2025). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal, memberikan pendapat senada. CORE memperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini maksimum 4,8%. Paket stimulus tidak banyak berpengaruh, hanya mampu mendorong pertumbuhan sampai 4,9%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I tahun 2025 mengalami perlambatan, turun menjadi 4,87% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,11% ("CORE: Paket Stimulus", 2025).

Penambahan paket insentif dan bantuan sosial menunjukkan bahwa potensi pelemahan ekonomi telah mengancam perekonomian, terutama dari sisi pelemahan daya beli konsumen. Peneliti ekonomi CORE, Yusuf Rendi, mengatakan efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran dan bebas dari kebocoran birokrasi. Penebalan bantuan sosial, misalnya, perlu disertai dengan pemutakhiran data penerima agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun ketimpangan distribusi. Untuk insentif ke sektor transportasi dan energi harus dikawal dengan kebijakan keberlanjutan dan mendorong transformasi struktural atau perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara yang lebih dalam. Direktur Eksekutif Indef, Esther S.A., menyatakan bahwa insentif jangan hanya fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah, insentif juga harus diberikan kepada sektor industri dan bisnis serta masyarakat menengah. Selain itu, insentif juga harus mampu mendorong investasi dan ekspor ("Paket Stimulus Harus", 2025).

## Penutup

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan stimulus berupa lima paket kebijakan yang terdiri dari: diskon transportasi, diskon tarif tol; penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan; BSU; dan perpanjangan diskon iuran JKK. Paket stimulus ini dikeluarkan untuk merespons dampak perekonomian global dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, agar dapat mencapai target pertumbuhan 5% di tahun 2025.

Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas paket stimulus ini dan menilai kebijakan ini sebagai reaksi panik pemerintah terhadap perlambatan ekonomi yang terjadi. Skema stimulus ini tidak berdampak jangka panjang dan hanya menysasar masyarakat kelas bawah yang berdaya beli rendah. Selain membebani anggaran, stimulus ini dikhawatirkan akan berbenturan dengan program insentif lainnya.

Komisi XI DPR RI perlu memantau pelaksanaan program stimulus ini agar dapat tepat sasaran dan bebas dari kebocoran birokrasi. Selain itu, juga perlu mendorong pemerintah untuk mendesain program yang dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dan berdampak jangka panjang.

## Referensi

- CORE: Paket stimulus belum cukup dongkrak pertumbuhan ke 5 persen. (2025, Juni 2). *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4873613/core-paket-stimulus-belum-cukup-dongkrak-pertumbuhan-ke-5-persen>
- Ekonom nilai enam insentif ekonomi bisa dongkrak daya beli masyarakat. (2025, Mei 30). *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4867657/ekonom-nilai-enam-insentif-ekonomi-bisa-dongkrak-daya-beli-masyarakat>

- Ekaptiningrum, K. (2025, Mei 27). Ekonom FEB UGM sebut paket insentif ekonomi penting untuk dorong pertumbuhan ekonomi. *Berita*. Universitas Gadjah Mada. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/14060-ekonom-feb-ugm-sebut-paket-insentif-ekonomi-penting-untuk-dorong-pertumbuhan-ekonomi>
- Paket stimulus harus memiliki dampak berganda ke perekonomian. (2025, Juni 3). *Koran Jakarta*. <https://koran-jakarta.com/2025-06-03/paket-stimulus-harus-memiliki-dampak-berganda-ke-perekonomian>
- P.D, M. R. (2025, May 28). 6 Stimulus ekonomi meluncur 5 Juni! Simak besaran bansos beras dan BSU pekerja. *Espos Indonesia*. <https://news.espos.id/6-stimulus-ekonomi-meluncur-5-juni-simak-besaran-bansos-beras-dan-bsu-pekerja-2100941>
- Pemerintah luncurkan lima paket stimulus ekonomi, berikut daftarnya. (2025, Juni 2). *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-luncurkan-lima-paket-stimulus-ekonomi-berikut-daftarnya-1623152>
- Rincian 6 paket insentif yang akan meluncur Juni 2025 termasuk diskon tarif listrik. (2025, Mei 30). *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/rincian-6-paket-insentif-yang-akan-meluncur-juni-2025-termasuk-diskon-tarif-listrik-1593440>
- Safitri, M. (2025, Juni 2). Presiden Prabowo Gulirkan Paket Stimulus Ekonomi Rp24,44 Triliun untuk Jaga Momentum Pertumbuhan. *Presiden RI*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-gulirkan-paket-stimulus-ekonomi-rp2444-triliun-untuk-jaga-momentum-pertumbuhan/>

